

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk merupakan salah satu komponen penting dalam berjalannya suatu negara, seperti tertera pada syarat awal pembentukan suatu negara yang harus memiliki wilayah, rakyat, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Penduduk memiliki potensi besar dalam peningkatan produksi rumah tangga, perusahaan, atau aset negara. Selain itu, penduduk menjadi salah satu alasan keberhasilan suatu negara, hal ini dikarenakan penduduk dapat mempengaruhi perkembangan negara dari waktu ke waktu dengan banyaknya perubahan dari keberagaman sumber daya yang ada. Dalam konteks ini, penduduk merujuk pada jumlah dan kualitas orang yang tinggal di suatu wilayah dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan suatu negara.

Berdasarkan laporan worldsometers, Indonesia termasuk kedalam salah satu dari sepuluh negara penyumbang penduduk terbesar dunia, dengan berada di urutan ke empat dibawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (Annur, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278.696.200 jiwa. Salah satu penyebab dari maraknya pertambahan jumlah penduduk di Indonesia dikarenakan angka kelahiran yang terus meningkat. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadi suatu tantangan negara yang harus segera ditangani dengan serius.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil baru saja merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2022. Isinya, diketahui jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa. “Terdapat kenaikan sebanyak 2.529.862 jiwa dibanding tahun 2020,” kata Direkur Jenderal Dukcapil, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat dimintai keterangan lebih lanjut oleh wartawan.

Sumber:<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri> diakses pada 4 April 2023, pukul 15.00

Data terkait jumlah penduduk di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada kualitas sumber daya yang tersedia serta dapat berpotensi mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang digolongkan cukup rendah akan menghambat pembangunan yang baik dari segi pemerintahan maupun bermasyarakat. Jika hal ini terus terjadi tanpa adanya penyelesaian yang serius, maka kualitas negara Indonesia akan menurun dan berpengaruh pada pembangunan selanjutnya.

Pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya baik dari segi aspek fisik pembangunan infrastruktur maupun pada sumber daya manusia agar menjadi lebih berkualitas. Sebagai pembentuk dan pelaksana kebijakan tentunya pemerintah memiliki tanggungjawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan, memprioritaskan aspirasi rakyat dalam proses pembangunan, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam pertumbuhan laju penduduk ini dengan cara menekan angka kelahiran di Indonesia dengan berbagai program yang nantinya dapat membantu

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran dari laju pertumbuhan penduduk.

Dengan besarnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, menurut Presiden Jokowi, ada tiga masalah yang dihadapi yaitu masalah pangan, sandang, dan kesehatan. “Jadi yang Namanya keluarga itu harus direncanakan, diatur. Oh, saya ingin anak saya satu, anak saya dua. Karena saya ingin anak saya ini duaduanya sekolah sampai perguruan tinggi, entah bagaimana caranya saya akan lakukan. Dihitung, kalau masuk perguruan tinggi itu butuh uang, katakanlah Rp 3.000.000. Berarti saya harus siapkan kalau dua orang Rp 6.000.000. Menyiapkannya dari mana,” tutur Presiden.

Sumber: <https://setkab.go.id/laju-pertumbuhan-penduduk-13-persen-pemerintah-kembali-galakkan-program-kb/> diakses pada 4 April 2023, pukul 15.00

Berdasarkan pernyataan diatas dalam upaya dalam usaha untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi antara program-program pengaturan kelahiran dan berbagai upaya pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan, transmigrasi, kesehatan, pengendalian urbanisasi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur di daerah. Usaha penurunan laju pertumbuhan dimulai dari lingkungan terkecil yakni dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan bahwa kewenangan BKKBN tidak hanya mengatur keluarga berencana dan keluarga sejahtera saja namun juga menyangkut mengenai masalah pengendalian penduduk. BKKBN telah menginisiasi berbagai program terkait dengan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, termasuk program Kampung KB.

Program Kampung KB merupakan implementasi dari tiga prioritas pembangunan, yaitu Nawacita ke-3, 5, dan 8. Nawacita ke-3 bertujuan untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Nawacita ke-5 bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sementara Nawacita ke-8 bertujuan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan ulang.

BKKBN mendapat mandat langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk mengembangkan program atau kegiatan yang dapat meningkatkan pencapaian target Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program atau kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi simbol dari program BKKBN dan memberikan kontribusi langsung serta manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam perencanaannya dicanangkan Program Kampung KB yang akan tersebar diseluruh Indonesia dengan setiap kecamatan harus memiliki satu Kampung KB.

Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat desa di mana terjadi integrasi dan konvergensi dalam upaya pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam semua aspeknya, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, dengan penekanan pada peningkatan kekuatan lembaga keluarga dan masyarakat melalui beragam program dan kegiatan yang memperhatikan tahapan kehidupan manusia.

Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) didasarkan pada prinsip menciptakan keluarga kecil yang berbahagia dan sejahtera melalui pelaksanaan delapan fungsi Keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta menghapus kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK bisa diukur melalui berbagai aspek, termasuk pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup penduduk, yang tercermin dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilihat dari berbagai indikator yang tercermin dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Jawa Timur, menjadi fokus bagi BKKBN Jawa Timur Perwakilan Surabaya dan Bapemas KB Kota Surabaya untuk menginisiasi Kampung KB. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Jawa Timur, terutama di Kota Surabaya. Pencanaan Kampung KB pertama kali dilakukan di RW XII Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir oleh Ibu Walikota Tri Rismaharini. Saat ini, setiap Kecamatan di Kota Surabaya sudah memiliki setidaknya satu

Kampung KB, salah satunya ialah Kampung KB WR Soepratman yang terletak di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2023, proporsi penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Surabaya adalah sekitar 50,47% perempuan dan 49,53% laki-laki, dengan jumlah total penduduk mencapai 3.009.286 jiwa. Kecamatan Tambaksari menunjukkan jumlah penduduk tertinggi, mencapai 226.995 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Sawahan dan Semampir dengan masing-masing 199.336 jiwa dan 182.371 jiwa.

Wilayah Kecamatan Tambaksari memiliki luas yang signifikan dan padat penduduknya, dengan masyarakat yang beragam, mencakup berbagai etnis, ras, dan agama. Kecamatan Tambaksari terdiri dari 8 Kelurahan salah satunya yakni Kelurahan Kapasmadya Baru yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari berjualan atau wiraswasta. Kelurahan Kapasmadya Baru terdiri dari 8 RW dan 92 RT dengan jumlah penduduk 39.728 jiwa menjadi satu tantangan dalam menghadapi permasalahan kompleks yang terjadi.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Tambaksari Tahun 2023

Kelurahan	Warga Negara Indonesia (WNI)		
	Laki-laki	Perempuan	Total WNI
Tambaksari	9,553	9,927	19,480
Pacarkeling	10,899	11,424	22,323
Dukuh Setro	11,493	11,479	22,972
Gading	15,114	15,497	30,611
Ploso	17,224	17,762	34,986
Rangkah	8,254	8,623	16,877

Kelurahan	Warga Negara Indonesia (WNI)		
	Laki-laki	Perempuan	Total WNI
Kapasmadya Baru	19,909	19,819	39,728
Pacarkembang	19,731	20,287	40,018

Sumber : Kecamatan Tambaksari, 2023

Berdasarkan data kependudukan pada website Kecamatan Tambaksari menunjukkan bahwa Kelurahan Kapasmadya Baru memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kelurahan Pacarkembang. Hal ini menjadi salah satu alasan terpilihnya Kelurahan Kapasmadya Baru RW 1 menjadi Kampung KB di wilayah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Banyaknya jumlah penduduk di wilayah kelurahan Kapasmadya Baru tentunya akan mempengaruhi berbagai sektor seperti pendidikan rendah, ekonomi kecil, pelayanan cepat tanggap, beresiko stunting dan sebagainya.



Gambar 1. 1 Kondisi Wilayah Kampung KB Kapasmadya Baru
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Program KKBPK melalui Keluarga Berencana (KB) juga bertujuan untuk mengatur jumlah anak, jarak dan usia ideal antar kelahiran, mengelola kehamilan, memberikan perlindungan, serta mendukung hak reproduksi untuk

menciptakan keluarga yang berkualitas. Dalam rangka program KKBPK yang bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, partisipasi aktif masyarakat dalam mengadopsi program KB menjadi kunci utama. Fokus utama dari program tersebut adalah meningkatkan pemanfaatan alat kontrasepsi modern oleh Pasangan Usia Subur (PUS) untuk meningkatkan efektivitasnya.

Saat ini berbagai macam alat kontrasepsi modern telah disediakan sebagai pilihan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) sesuai dengan kebutuhannya seperti IUD, kondom, pil, suntik, implan, Medis Operasi Wanita (WOM), serta Medis Operasi Pria (MOP). Meskipun telah disediakan alat kontrasepsi modern, masih ada beberapa Pasangan Usia Subur (PUS) maupun suami-istri yang telah memiliki dua anak menggunakan alat kontrasepsi tradisional seperti pantang berkala/kalender, pijat urut, jamu, dan senggama terputus. Namun tentu saja tetap diberikannya motivasi untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang, sehingga program KB dapat terus berjalan dengan efektif dan efisien.

“Dengan menggunakan kontrasepsi, mereka bisa dapat membatasi kehamilannya, dapat mengatur jarak (kelahiran) anaknya, dapat merencanakan kehamilan sehingga akan melahirkan anak yang sehat tanpa risiko stunting,” terang Eni. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IBI (Ikatan Bidan Indonesia), Dr Emi Nurjismi, M.Kes membeberkan, bahwa ada banyak pilihan alat kontrasepsi yang mudah diakses dan didapatkan masyarakat. Namun, apabila alat kontrasepsi jangka panjang belum bisa dilakukan saat postpartum atau nifas, pasangan suami istri bisa menggunakan kondom. “Tentu untuk bisa mengatur kehamilan, menjaga jarak (kelahiran anak), dan lain sebagainya harus memanfaatkan salah satu alat kontrasepsi, terutama alat kontrasepsi modern,” jelas Emi.

Sumber: <https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/15/120100123/bkkbn-ingatkan-pentingnya-program-keluarga-berencana-untuk-mencegah?page=all>
diakses pada 4 April 2023, pukul 16.00

Tabel 1.2 Jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Tambaksari Tahun 2021

No.	Kelurahan	PUS Peserta KB		PUS Bukan Peserta KB	Jumlah PUS
		Modern	Tradisional		
1.	Tambaksari	795	41	1.048	1.884
2.	Ploso	1.583	18	2.554	4.155
3.	Gading	1.555	13	2.121	3.689
4.	Pacar Kembang	1.960	52	2.348	4.360
5.	Rangkah	965	21	1.001	1.987
6.	Pacar Keling	701	19	1.432	2.152
7.	Kapasmadya Baru	2.395	53	2.654	5.102
8.	Dukuh Setro	1.549	258	1.643	3.450

Sumber : Kecamatan Tambaksari, 2021

Berdasarkan data dan pernyataan diatas, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada pada Kecamatan Tambaksari menunjukkan bahwa Kelurahan Kapasmadya Baru memiliki jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) terbanyak. Sudah banyak alat kontrasepsi modern yang dapat digunakan oleh masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri subur, namun masih ada pasangan suami istri yang memilih menggunakan kontrasepsi tradisional.

Kampung KB sebagai suatu pendekatan pembangunan yang bersifat umum, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memaksimalkan upaya pemberdayaan serta penguatan institusi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Pasalnya, Kampung KB menjadi contoh atau representasi kecil dari proses pembangunan yang melibatkan semua sektor dalam masyarakat. Namun

nyatanya tidak semua program maupun sektor ikut andil dalam berjalannya program, sehingga keluarlah Surat Edaran Kemendagri No. 843.4/2879/SJ pada tanggal 15 April 2020 untuk merubah Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan perubahan ini diharapkan program Kampung KB mampu berjalan secara optimal dengan keterlibatan dari beberapa sektor yang ada.

Kampung KB yang diterapkan Kelurahan Kapasmadya Baru bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengendalikan reproduksi melalui pelayan KB sehingga balita stunting dan pendidikan rendah dapat teratasi. Pendidikan yang rendah tentu menjadi masalah bagi masa depan keluarga yang akan berdampak pada perekonomian kecil atau tidak cukup bagi keluarga, maka dari itu Kampung KB memberikan pengarahan melalui edukasi dan juga pelatihan bagi keluarga agar menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas.

Randal B. Ripley (Anggara, 2014:13) menyatakan bahwa dalam proses kebijakan telah termasuk di dalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama. Secara garis besar kebijakan publik mencakup perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Agar program KKBPK tetap berkelanjutan dan kesertaan dalam menggunakan KB tetap tinggi tanpa terjadi penurunan, dilakukan pembinaan secara berkala melalui kelompok-kelompok kegiatan yang sudah terbentuk di masyarakat. Salah satu kegiatan kelompok yang dimaksud adalah program keluarga sejahtera yang dipraktikkan melalui Bina Keluarga Sejahtera (BKS). Bina Keluarga Sejahtera (BKS) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan orang tua beserta anggota keluarga lainnya dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik secara fisik maupun aspek emosional, motorik, dan sosial ekonomi.

Program Bina Keluarga Sejahtera (BKS) terdiri dari beberapa bagian, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang terdiri dari anggota keluarga yang berinteraksi satu sama lain, terdiri dari berbagai jenis keluarga sejahtera, termasuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah menggunakan KB serta yang belum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Tujuan utama UPPKS ialah meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, selain itu UPPKS juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga agar terwujudnya keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang baik akan mempengaruhi bagaimana kualitas dari keluarga tersebut. BKKBN juga memulai berbagai usaha inisiatif dengan tujuan mendorong perekonomian keluarga melalui pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan semangat keluarga dalam berwirausaha secara berkesinambungan.

Implementasi kebijakan merupakan bentuk dari pelaksanaan suatu kebijakan dengan melibatkan berbagai sektor baik dari segi pemerintahan maupun masyarakat melalui pelayanan, pengorganisasian birokrasi, dan sebagainya. Van

Meter dan Van Horn (Anggara, 2014:232), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman berbagai elemen yang bekerja bersama secara sinergis, termasuk interaksi antara berbagai pihak terlibat, kemampuan pelaksana di lapangan, strategi komunikasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi. Program Kampung KB akan berjalan secara baik apabila terdapat kolaborasi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan di lapangan, dan pendukung kebijakan melalui keikutsertaan.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Dalam pelaksanaannya tentunya PKB tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu dibentuklah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang dibantu oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari RT, RW, Kader, serta Karang Taruna dalam melakukan penyuluhan maupun sosialisai kepada masyarakat setempat.

Permasalahan kependudukan yang dibiarkan tanpa adanya solusi yang tepat dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan seperti stunting, kriminalitas meningkat, dan kurangnya pendidikan. Tanpa adanya pemahaman yang sama dari pelaksana kebijakan dengan masyarakat, akan mempersulit pencapaian dari program Kampung KB. Akibatnya, kualitas sumber daya masyarakat akan semakin menurun dan sulitnya mencapai harapan keluarga sejahtera.

Peneliti memilih Kampung KB yang berada di wilayah Kelurahan Kapasmadya Baru sebagai tempat penelitian, karena Kelurahan Kapasmadya Baru termasuk wilayah padat penduduk dengan masyarakat beragam, juga masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah, dan jumlah PUS yang meningkat akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Dengan begitu, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Kapasmadya Baru membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks dari berbagai sektor, khususnya dalam hal kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Kampung KB, peneliti meyakini perlunya studi lebih lanjut mengenai penerapan Program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru. Dalam hal ini dapat diterapkan dengan mengidentifikasi bagaimana implementor untuk mencapai tujuan dari program, ditinjau dari teori George Charles Edward III yang terdiri dari 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Dengan demikian peneliti mengangkat judul **“Implementasi Program Kampung**

Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kapasmadya Baru Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi program Kampung KB di Kelurahan Kapasmadya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Publik dan menambah literature kajian mengenai program Kampung KB dan pelayanan publik

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai dasar evaluasi bagi para *stakeholder* dan implementor kebijakan terkait program kebijakan dan tambahan referensi bacaan untuk perluasan

wawasan dalam kajian penelitian kedepannya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.